

# ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL UNTUK MENGUATKAN DAYA SAING DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

**Nailatul Husna, Irwan Noor, Mochammad Rozikin**

*Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang*

*Email: naila.husna@gmail.com*

---

## **Abstract**

*Regional development need attention to regional potential, which is done by examining the GDP to notice any potential base and non-base in order to optimize development results in order to obtain a high level of welfare. If the government want their regency have competitiveness, development programs should be set off from primary economic potential. This research aims analyze the potential development of local economy in Gresik Regency. As well as the efforts of local authorities in favour of Gresik Regency development of primary local economic potential to strengthen the competitiveness of the region. The approach used is quantitative descriptive, with the method of Location Quotient and Shift Share. The results of this research say that most potential sector that developed in Gresik Regency that is, manufacturing industry sector; electricity, gas and water supply; as well as mining and quarrying sector. While Government support Gresik as seen Regional Long Term Development Plan (RLTDP) and Regional Medium Term Development Plan (RMTDP) also in Regional Budget Revenue and Expenditure (RBRE) allocation. tend to prioritize on a sector that is less like a potential trade, hotels and restaurants; as well as agriculture. Thus, the Government of Gresik Regency to prioritising the development programs and allocating budget on primary sector.*

**Keywords :** *Base Potential, Government Efforts, Regional Competitive*

---

## **Abstrak**

Pembangunan daerah perlu memperhatikan potensi daerah, yang dilakukan dengan menelaah PDRB untuk melihat adanya potensi basis dan non basis dalam rangka mengoptimalkan hasil pembangunan guna mendapatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Jika pemerintah menginginkan daerahnya berdaya saing, maka program pembangunannya harus berangkat dari pengembangan potensi ekonomi unggulannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan potensi ekonomi lokal di Kabupaten Gresik. Serta Upaya pemerintah daerah Kabupaten Gresik dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal unggulan untuk memperkuat daya saing daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan metode *Locaion Quotient* dan *Shift Share*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa sektor yang paling potensial dikembangkan di Kabupaten Gresik yaitu, sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dilihat dari RPJPD dan RPJMD serta alokasi APBD cenderung memprioritaskan pada sektor yang kurang potensial seperti perdagangan, hotel, dan restoran; serta pertanian. Maka, pemerintah Kabupaten Gresik perlu memprioritas program pembangunan maupun pengalokasian anggarannya pada sektor unggulan.

**Kata Kunci :** *Potensi Basis/Unggulan, Upaya Pemerintah, Daya Saing Daerah*

---

## **Pendahuluan**

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui

pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1988,h.4) pembangunan adalah “upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu.” Jadi,

pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pencapaian pelaksanaan pembangunan yang diharapkan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 menjadi reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal. Adanya otonomi daerah mampu mendorong kegairahan daerah untuk mengembangkan perekonomiannya. UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Abdullah dkk (2002, h.15) menjelaskan bahwa daya saing daerah adalah

“kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya saing daerah sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif daerah.

Peningkatan daya saing dengan menggunakan keunggulan komparatif yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal pernah diterapkan di Provinsi Gorontalo. Gorontalo pernah menjadi provinsi termiskin di Indonesia, namun hal tersebut berubah ketika Fadel Muhammad menjabat sebagai Gubernur, Beliau mengoptimalkan produk unggulan Gorontalo dalam sektor pertaniannya. Jagung, peternakan sapi, dan usaha ikan tuna merupakan produk unggulan yang dihasilkan Provinsi Gorontalo untuk dipasarkan bukan hanya dalam skala lokal tetapi hingga internasional. Pembangunan daerah yang didasarkan pada potensi lokal tersebut mampu membuat pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo naik sebesar 7-8 persen diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan penduduk miskin menurun dari 72 persen pada tahun 2001 hingga 33 persen pada tahun 2004. (Muhammad, 2008, h.x-xi). Pengalaman dari Provinsi Gorontalo menggambarkan bahwa pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi potensi yang ada dan dengan prioritas program pemerintah yang mengarah pada pengembangan potensi ekonomi lokal akan mendapat hasil pembangunan yang optimal dan cepat, yang akan berdampak pula pada terciptanya kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Secara otomatis pula akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga Gorontalo mempunyai posisi daya saing yang kuat pula.

Seperti halnya Gorontalo, pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka pembangunan daerah tentu harus dijadikan percotohan oleh daerah lainnya di Indonesia, begitu juga dengan Kabupaten Gresik. Seperti yang disebutkan oleh BPS Kabupaten Gresik (2011a, h:19) bahwa tahun 2009 besaran PDRB Kabupaten

Gresik mencapai Rp. 32.188 Milyar dan menduduki peringkat keempat di Jawa Timur dibawah Kota Surabaya, Kota Kediri, dan Kabupaten Sidoarjo. Dijelaskan pula oleh BPS Kabupaten Gresik (2011b, h.20) jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi kabupaten Gresik dan kabupaten Lamongan merupakan yang tertinggi di susul dengan kota surabaya dan kabupaten Pasuruan. Namun Tingkat pengangguran terbuka di Gresik cukup tinggi setelah kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kota Kediri.

Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gresik menandakan bahwa sembilan sektor mata pencaharian yang tercermin dalam PDRB belum dimaksimalkan potensinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Tingginya angka pengangguran secara tidak langsung juga menggambarkan bahwa garis kesejahteraan masyarakat yang rendah, yang berarti tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Pembangunan yang di dukung dengan prioritas program pengembangan potensi ekonomi lokal yang unggul dapat meningkatkan daya saing daerahnya. Artinya, jika pemerintah menginginkan daerahnya memiliki daya saing maka program-program pembangunannya harus berangkat dari pemngembangan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki daerah tersebut. Melalui pengembangan potensi ekonomi unggulan tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Misalnya, daerah yang memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, tetapi prioritas program pemerintahnya mengarah pada sektor pariwisata, maka perkembangan sektor pertanian akan mengalami perlambatan bahkan seharusnya sektor pertanian dapat memberi distribusi ke PDRB yang tinggi dibanding sektor pariwisata, disini distribusinya akan sedikit. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang tepat dalam rangka pembangunan daerah dinilai menjadi faktor penentu penguatan daya saing suatu daerah.

Berdasarkan observasi awal, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memang telah melakukan analisis potensi ekonomi di wilayahnya pada tahun 2007, melalui pendekatan *product approach* dan sampai saat ini masih belum dilakukan lagi. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik” dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda.

### **Tinjauan Pustaka**

**Potensi ekonomi daerah** didefinisikan oleh Suparmoko (2002, h.99) sebagai “kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.” Sumihardjo (2008, h.114) menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD). Di dalam RPJPD dan RPJMD tampak bidang-bidang prioritas pada setiap program daerah kabupaten/kota dalam memperkuat pengembangan sektor unggulan. Selain itu, APBD harus mencerminkan program-program dan tujuan-tujuan pembangunan. Karena suatu rencana akan bersifat operasional apabila anggarannya tersedia. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembangunan pada dasarnya adalah kunci keberhasilan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk memperkuat daya saing daerah. Muktianto (2005, h.8) menjelaskan bahwa pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem kelembagaan. (dikutip dari Sumiharjo, 2008,

h.12). Dalam menelaah PDRB dilakukan untuk mengetahui potensi basis dan non basis. Suatu daerah yang memiliki keunggulan memberikan kekhasan tersendiri yang tidak ada pada daerah lain, sehingga sektor unggulan tadi dapat dikatakan sebagai kegiatan basis (Triyuwono & Yustika, 2003, h.93).

Tarigan (2007, h.28) menjelaskan bahwa **teori basis ekonomi** mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang tidak mengekspor, yakni hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri. Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (*primer mover rule*), sedangkan setiap perubahan mempunyai “efek *multiplier*” terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis antara lain menggunakan metode analisis “location quotient” (LQ). (Triyuwono & Yustika, 2003, h.93). Dengan mengetahui kegiatan basis disuatu daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, maka dapat mengetahui daya saing daerah tersebut.

Abdullah dkk (2002, h.15) menjelaskan bahwa “**daya saing daerah** adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” Indikator-

indikator utama dan prinsip-prinsip penentu daya saing daerah salah satunya adalah perekonomian daerah. Prinsip-prinsip Kinerja perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing daerah yakni :

- Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka pendek.
- Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu.
- Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik. (Abdullah dkk, 2002, h.17)

### Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan alasan bahwa dalam penelitian bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2005, h.36). Metode yang digunakan adalah metode *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS) :

**Analisis Location Quotient (LQ)**, Putra (2011, h.163) mengatakan fungsi utama dari analisis LQ adalah untuk mengetahui sektor mana yang ada di suatu daerah yang menjadi unggulan (komoditas) dan sektor mana yang tidak menjadi unggulan (atau pertumbuhannya negatif/defisit) dengan membandingkan suatu daerah dengan daerah ditingkat atasnya pada kurun waktu tertentu. Lebih lanjut lagi dijelaskan rumus LQ yakni:  $\frac{X_{ir}}{X_r}$

Keterangan :

$$\frac{X_{in}}{X_n}$$

- $LQ > 1.0$ , sektor komoditas (unggulan)
- $LQ < 1.0$ , bukan sektor komoditas (defisit)

**Shift Share Analysis.** Putra (2011, h.165) mengatakan analisis *shift-share*

digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. SS terdiri dari tiga komponen (Tarigan, 2007, h.82-87) :

- National Share* (N), hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan sektor *i* di Kabupaten Gresik tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan Provinsi rata-rata berdasarkan peringkat teratas.
- Propotional* (Industry-Mix) (P), hasil perhitungan menunjukan jika P bernilai (+) maka sektor *i* tumbuh lebih cepat di Kabupaten Gresik dibandingkan dengan Di provinsi Jawa timur. Sedangkan, jika P bernilai (–) berarti sektor *i* tumbuh lebih lambat di Kabupaten Gresik dibandingkan dengan di Provinsi Jawa timur
- Differential Shift* (D)/*Competitive Position* (Cp), hasil perhitungan menunjukan Jika D bernilai (+) maka sektor *i* lebih kompetitif di Kabupaten Gresik dibandingkan dengan Di provinsi Jawa timur, sedangkan Jika D bernilai (–) berarti sektor *i* lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Kabupaten Gresik

Dalam suryawaksita (2012, h.34) dijelaskan bahwa konsep *differential dhift* diperluas oleh Esteban-Marquillas dengan *homothetic employment* (HE) yaitu jumlah atau perubahan pendapatan yang diharapkan disektor *i* wilayah *j*, jika daerah tersebut memiliki struktur pendapatan yang sama di tingkat nasional. Rumus yang dipakai untuk memperoleh nilai (HE) adalah sebagai berikut:

$$E_{ij}'' = E_{ij} \left( \frac{E_{in}}{E_n} \right)$$

$$G = Ns_{ij} + P_{ij} + [RSE_{ij} + AE_{ij}]$$

$$G = (E_{ij} * rn) + [E_{ij}(rin - rn)] + [E_{ij}''(rij - rin) + (E_{ij} - E_{ij}'')(rij - rin)]$$

Keterangan :

$$rij = \frac{E_{ij} - E_{ij}'}{E_{ij}} : \text{Pertumbuhan sektor } i$$

Kabupaten Gresik

$rin = \frac{E_{in} - E_{in}'}{E_{in}}$  : Pertumbuhan sektor *i* di Provinsi Jawa Timur

$rn = \frac{E_n - E_n'}{E_n}$  : Pertumbuhan PDRB total provinsi Jawa Timur

$E_{ij}$  : PDRB sektor *i* Kabupaten Gresik tahun awal 2006

$E_{ij}'$  : PDRB sektor *i* Kabupaten Gresik tahun akhir 2011

$E_{in}$  : PDRB sektor *i* Provinsi Jawa Timur tahun awal 2006

$E_{in}'$  : PDRB sektor *i* Provinsi Jawa Timur tahun akhir 2011

$E_j$  : Total PDRB Kabupaten Gresik tahun awal 2006

$E_j'$  : Total PDRB Kabupaten Gresik tahun akhir 2011

$E_n$  : Total PDRB Provinsi Jawa Timur tahun awal 2006

$E_n'$  : Total PDRB Provinsi Jawa Timur tahun akhir 2011

$E_{ij}''$  : Variabel wilayah ( $E_{ij}$ ) yang diharapkan

Efek lokasi ( $AE_{ij}$ ) akan diperoleh :

- Spesialisasi sektor *i* di wilayah *j* dengan simbol ( $E_{ij} - E_{ij}''$ )
- Keuntungan kompetitif atau daya saing wilayah yaitu besaran yang ditunjukkan oleh nilai dari ( $rij - rn$ )

Dengan keterangannya adalah sebagai berikut

- Jika spesialisasi sektor bernilai positif (+) dan keunggulan kompetitif bernilai negatif (—) maka sektor tersebut masuk dalam kriteria *competitive disadvantage, specialized* (Kode 1)
- Jika spesialisasi sektor bernilai negatif (—) dan keunggulan kompetitif bernilai negatif (—) maka sektor tersebut masuk dalam kriteria *competitive disadvantage, not specialized* (Kode 2)
- Jika spesialisasi sektor bernilai negatif (—) dan keunggulan kompetitif bernilai positif (+) maka sektor tersebut masuk dalam kriteria *competitive advantage, not specialized* (Kode 3)
- Jika spesialisasi sektor bernilai positif (+) dan keunggulan kompetitif bernilai positif (+) maka sektor tersebut masuk

dalam kriteria *competitive advantage*, *specialized* (Kode 4)

## Pembahasan

### 1. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Kabupaten Gresik

Pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan potensi daerah salah satunya dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Muktianto, 2005, h.08 dikutip dari Sumiharjo, 2008, h.12). Dalam menelaah PDRB dilakukan untuk mencari sektor-sektor yang paling potensial untuk dikembangkan atau mencari sektor basis (unggulan). Untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis antara lain menggunakan metode analisis *location quotient* (LQ), namun sifat LQ ini hanya berguna dalam jangka pendek, oleh karena itu disempurnakan dengan analisis *shift share*

yang berguna untuk analisis jangka panjang (Triuwono & Yustika, 2003, h.93-94). Hasil analisis LQ dan SS di Kabupaten Gresik pada tahun 2006-2011 ditunjukkan pada tabel 1 dan 2.

Berdasarkan hasil LQ (Tabel 1) diketahui tiga sektor yang paling potensial untuk dikembangkan adalah sektor industri pengolahan dengan nilai LQ 1,99; kemudian disusul dengan sektor listrik, gas, dan air bersih dengan nilai LQ mencapai 1,42; posisi ketiga adalah sektor penambangan dan penggalian sebesar 1,36. Jika sektor-sektor tersebut dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan dukungan kebijakan dan mendapat prioritas program maka sektor-sektor tersebut akan menambah keuntungan bagi Kabupaten Gresik dimasa yang akan datang. Berikut ini merupakan tabelnya :

**Tabel 1 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Tahun 2006-2011**

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata	Peringkat
Pertanian	0,62	0,60	0,60	0,56	0,57	0,57	0,59	6
Pertambangan dan Penggalian	0,84	0,77	0,72	1,90	1,91	2,01	1,36	3
Industri Pengolahan	1,97	1,98	2,00	1,98	2,00	1,99	1,99	1
Listrik, gas, air bersih	1,39	1,33	1,40	1,43	1,47	1,51	1,42	2
Konstruksi	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	0,38	9
Perdagangan, hotel, dan restoran	0,67	0,68	0,69	0,69	0,69	0,70	0,68	5
Pengangkutan dan komunikasi	0,49	0,51	0,51	0,47	0,46	0,44	0,48	8
Kuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	0,76	0,73	0,70	0,67	0,66	0,65	0,70	4
jasa-jasa	0,54	0,55	0,55	0,53	0,57	0,55	0,55	7

**Tabel 2 Hasil Rata-Rata Hasil Analisis Shift Share (SS) Tahun 2006-2011**

Sektor	Regional Growth/ Shift Share	National Share (N)	Propotional Shift (P)	Differential Shift (D)	Differential Shift(D)		Alocation Effect (AE)		Kode
					RSE	AE	Spesialized	Competitive Advantage	
Pertanian	33.092,44	84.698,97	-44.048,25	-7.558,28	-12.028,27	4.469,99	-954.238,87	-0,01	2
Pertambangan dan Penggalian	119.919,51	26.902,90	5.848,95	87.167,66	113.246,97	-26.079,30	93.593,39	0,35	4
Industri Pengolahan	445.212,01	477.516,73	-133.015,36	100.710,64	50.654,14	50.056,49	3.810.445,14	0,01	4
Listrik, gas, air bersih	26.326,05	17.665,53	-10,93	8.671,45	6.209,45	2.461,99	81.588,11	0,03	4
Konstruksi	13.834,86	11.276,50	-2.128,03	4.686,39	12.632,54	-7.946,14	-301.230,38	0,03	3
Perdagangan, hotel, dan restoran	313.658,93	186.366,26	70.356,35	56.936,32	83.314,42	-26.378,10	-1.380.353,22	0,02	3
Pengangkutan dan komunikasi	43.116,21	30.236,10	20.191,70	-7.311,59	-15.431,06	8.119,46	-510.569,82	-0,01	2
Kuangan, Persewaan, dan	29.268,26	34.384,06	6.693,21	-11.809,02	-16.495,92	4.686,90	-233.163,75	-0,02	2

Jasa perusahaan									
Jasa-jasa	50.421,79	45.142,68	-5.973,25	11.252,36	20.792,80	-9.540,44	-606.070,60	0,02	3

Selain itu, hasil analisis *shift share* (Tabel 2) menguatkan bahwa tiga sektor yakni industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; serta litrik, gas, dan air bersih merupakan sektor unggulan dan memiliki daya saing dengan sektor yang sama di wilayah lain atau yang dikenal dengan sektor *Competitive advantage, specialized*. Namun, pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas, dan air bersih cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat jika dibanding dengan sektor yang sama di wilayah Jawa Timur. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif cepat.

## 2. Identifikasi Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Mendukung Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Unggulan untuk Menguatkan Daya Saing Daerah

Sumihardjo (2008, h.114) menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD). Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) harus mencerminkan program-program dan tujuan-tujuan pembangunan. Karena suatu rencana akan bersifat operasional apabila anggarannya tersedia. Dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengembangan potensi ekonomi lokalnya tercermin dalam prioritas program dalam dokumen RPJPD tahun 2005-2025 dan dokumen RPJMD tahun 2011-2015, yakni sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan adalah sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor pertanian.

Pengembangan sektor industri dinilai sudah sangat tepat karena sektor industri berdasarkan hasil LQ mendapatkan nilai 1,99 yang berarti  $> 1$  menandakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan masuk kategori sektor unggulan yang mampu bersaing dengan sektor yang sama di

daerah lain. Namun, pengembangan di sektor industri hanya mendapatkan alokasi anggaran rata-rata cukup sedikit, yakni senilai Rp. 451.329.666,67.

Sedangkan, prioritas program di sektor lainnya seperti perdagangan, hotel, dan restoran dinilai kurang tepat karena sektor perdagangan, hotel, dan restoran secara rata-rata mendapat nilai  $LQ < 1$ , menandakan bahwa sektor tersebut bukan sektor basis (unggulan). Tetapi, faktor lokasional Kabupaten Gresik yang dekat dengan pelabuhan, yakni pelabuhan perak dan pelabuhan Gresik sendiri, serta dekat dengan akses pasar, selain itu terpenuhinya sarana prasarana seperti jalan tol, kondisi jalan dan jembatan yang cukup baik membuat sektor ini cukup kompetitif meskipun bukan sektor unggulan, sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan daerah lain.

Sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan dan kelautan adalah sektor selanjutnya yang menapatkan prioritas program. Alasan utama Kabupaten mengembangkan sektor ini adalah karena sepertiga wilayah Gresik merupakan perairan sehingga potensial untuk dikembangkan perikanan. Padahal jika dilihat dari hasil analisis LQ sektor ini bukan sektor unggulan karena secara rata-rata, sektor pertanian mendapatkan hasil LQ 0,59. Selain itu, tidak mampu bersaing dengan daerah lain. Sehingga prioritas di bidang ini tidak akan menguntungkan pemerintah, namun disisi lain pembangunan dibidang pertanian juga sangat diperlukan untuk menyeimbangkan industrialisasi agar tidak terjadi konversi lahan besar-besaran, konversi wilayah industri harus berdasarkan RTRW, RDTRK, Program Lahan Pertanian yang Dipertahankan. Sektor pertanian mendapatkan dukungan anggaran yang paling besar diantara sektor lainnya yakni Rp. 13.950.155.097,00.

Sedangkan, sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor pertambangan dan penggalian juga tidak mendapatkan prioritas program di RPJPD, namun sektor-sektor

tersebut mendapatkan perhatian pada RPJMD. Padahal, jika dilihat berdasarkan nilai LQ sektor listrik, gas dan air bersih termasuk sektor basis (unggulan) dengan nilai LQ sebesar 1,42; begitu pula dengan sektor pertambangan dan penggalian yang mendapat nilai LQ 1,36; Selain itu, kedua sektor ini merupakan sektor yang mampu bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain. Jadi, dukungan program pemerintah pada sektor tersebut sudah tepat, namun dukungan dalam bidang anggaran dirasa kurang tepat karena pada sektor ini hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 129.221.631,67.

Pengembangan potensi unggulan ini diamanatkan melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mempecepat terwujudnya daya saing daerah, dimana hal tersebut salah satunya dapat dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan potensi daerahnya. Berdasarkan dokumen RPJPD dan RPJMD Prioritas program pemerintah Kabupaten Gresik adalah mengembangkan sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor pertanian. Dari ketiga sektor tersebut yang cukup mencerminkan pengembangan potensi ekonomi unggulan berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS) adalah pengembangan di sektor industri pengolahan. Jika pemerintah fokus pada pengembangan semua sektor unggulan maka, kemungkinan besar pemerintah dapat meningkatkan daya saing daerahnya pula. Syafar (2004) dalam Sumihardjo (2008, h.9) menjelaskan bahwa daya saing daerah berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi daerah dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan potensi daerah untuk menghasilkan dan memasarkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar secara berkesinambungan.

Indikator utama dan prinsip-prinsip penentu daya saing daerah menurut Abdullah dkk (2002, h.17) salah satunya adalah perekonomian daerah, Dimana perekonomian secara makro ini tergambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Upaya penguatan daya saingnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah melalui peningkatan dan

pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di Gresik diwujudkan dengan : (a) Mendorong pertumbuhan kluster-kluster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah; (b) Mendorong upaya pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi kluster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pementapan iklim bisnis yang kondusif.

Jika diambil suatu benang merah maka, pada dasarnya pemerintah sudah berusaha meningkatkan kualitas daya saingnya, namun berdasarkan penelitian dan analisa penulis, pemerintah Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memanfaatkan dan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan untuk menguatkan daya saingnya. Misalnya sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor pertambangan dan penggalian. Padahal jika dilihat kedua sektor ini jika di investasikan pada tahun ini, maka akan bermanfaat bagi pemerintah di tahun-tahun mendatang, karena sektor tersebut juga masuk dalam kriteria sektor unggulan, dan mempunyai tingkat daya saing. Apabila sektor-sektor unggulan lainnya diprioritaskan maka tidak menutup tingkat kemakmuran juga akan semakin meningkat. Jika masyarakat makmur, maka dapat dikatakan pembangunan daerahnya berhasil, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi daya saing daerahnya.

Memprioritaskan potensi unggulan bukan berarti mengabaikan potensi sektor ekonomi lain. Sektor yang tidak potensial sekalipun tetap perlu dikembangkan dan diperhatikan, karena pembangunan di satu sektor akan mempengaruhi pembangunan disektor lain. Oleh karena itu, pemerintah sebagai *stake holders* harus mampu merencanakan pembangunan yang dapat mensinergikan semua sektor, dengan memprioritaskan sektor unggulan seperti industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta sektor pertambangan, dan penggalian; agar dapat memberikan keuntungan maksimal dimasa yang akan datang, dan tetap memperhatikan sektor lain yang kurang unggul, namun cukup potensial



untuk dikembangkan, seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa; serta sektor konstruksi. Dan mengupayakan agar sektor yang tidak unggul dan tidak potensial tetap eksis dan tidak lenyap seperti sektor komunikasi dan pengangkutan, serta sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian dasar masyarakat. Karena mau tidak mau semua sektor menjadi tumpuhan masyarakat untuk mencari penghidupan.

### Kesimpulan

Sektor yang paling potensial dikembangkan adalah Sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor pertambangan dan penggalian. Namun, dari hasil identifikasi upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendukung pengembangan sektor unggulan dilihat dari RPJPD maupun RPJMD cenderung memprioritaskan pada sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran; serta pertanian. Sehingga, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemerintah belum secara maksimal mengolah dan

mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki.

Berdasarkan permasalahan tersebut, saran peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Gresik sebaiknya mengembangkan sektor unggulan dan berdaya saing yang lainnya seperti sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor pertambangan dan penggalian. Pemerintah juga sebaiknya melakukan koordinasi antara rencana investasi pemerintah dan rencana yang akan dilakukan oleh sektor swasta, Serta mengoptimalkan kerjasama antar daerah disekitarnya. Selain itu, pemerintah sebaiknya gencar melakukan upaya pemasaran potensi ekonomi unggulan untuk menarik investor yang dituangkan dalam visi/slogan daerah. Yang paling penting, dalam melakukan pengembangan potensi ekonomi lokal pemerintah tetap perlu mempertahankan *local wisdom* dan mendasarkan pembangunan ekonominya terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), agar dapat meminimalisir adanya dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.

---

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Piter dkk. (2002) **Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukurannya di Indonesia**. Yogyakarta, BPFE.
- BPS Kabupaten Gresik. (2011) **PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2006-2010** [Intenet], Gresik, BPS Kabupaten Gresik. Available from: BPS Gresik Regency Website <<http://gresikkab.bps.go.id/images/publikasi/pdrb2011/index.html>> [Accesed 22 Agustus 2012]
- BPS Kabupaten Gresik. (2011) **Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2011**. Gresik, BPS Kabupaten Gresik. Available from: BPS Gresik Regency Website <<http://gresikkab.bps.go.id/index.php/component/flippingbook/book/2?tmpl=component&print=1>> [Accesed 22 Agustus 2012]
- Bungin, Burhan. (2005) **Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya**. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Fadel. (2008) **Reiventing Local Government: Pengalaman dari Daerah**. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. (2011) **Studi Kebijakan Publik dan Pemerintahan dalam Perspektif Kuantitatif (Teknik, Metode, dan Pendekatan)**. Malang, UB Press.
- Sumihardjo, Tumar. (2008) **Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis potensi Daerah**. Bandung, Fokus Media.
- Suparmoko, M. (2002) **Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Yogyakarta, Andi Offset.
- Tarigan, Robinson. (2007) **Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi**. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1988) **Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori dan Penerapan**. Jakarta , Pustaka LP3ES.
- Triyuwono Iwan & Yustika Ahmad Erani. (2003) **Emansipasi nilai lokal ekonomi & Bisnis pasca sentralisasi pembangunan**. Malang, Bayumedia Publishing.